

MENGEMBANGKAN ISLAM DENGAN LOKAL WISDOM (MENGENAL STRATEGI KEBUDAYAAN NAHDLATUL ULAMA)

Ahmad Arifi

Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Jalan Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281. Telp. (0274) 589621-512474. Fax. (0274) 568177-519661.

Abstract

Religion and culture are two entities which always interact each others. Interaction between religion and culture can manifest in form of cohesiveness religion into community culture in the form of plural society behavior as an expression on religious society. On the other hand, a culture of society can integrate into religious values practices that manifested in the spirit of religious society spirituality. And than its called religious traditions or religious experiences based culture. The Nahdlatul Ulama (NU) is a Muslim community which uphold local tradition values. Therefore, the religious practices of nahdliyyin (members of the NU) reflect the nuance of Cultural Islam.

Key words: culture of society, the nahdlatul ulama, religious

Pendahuluan

Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi keagamaan di Indonesia merupakan salah satu (bahkan satu-satunya) ormas Islam yang dengan tegas menggunakan pendekatan kultural (kebudayaan) untuk pengembangan (dakwah) Islam, oleh karena itu NU sangat menghargai kebudayaan lokal. Saking tingginya penghargaan terhadap kebudayaan lokal, NU diidentikkan dengan kelompok Islam Kultural. Atau dengan istilah yang agak “konotatif”, NU sebagai ormas Islam tradisional yang “nguri-uri” (memelihara) tradisi lokal, namun tradisionalitas NU justru tidak serta merta menjadikan NU sebagai ormas Islam yang kaku dan tidak dinamis.

Historisitas NU menunjukkan bahwa adanya suatu lembaga yang dimiliki oleh NU sebagai organisasi sosial keagamaan yang menangani dan

membawahi urusan kebudayaan, yaitu Lesbumi (Lembaga Seniman, Budayawan Muslimin Indonesia). Keberadaan lembaga ini dari sejarahnya merupakan bentuk apresiasi kepada para seniman dan budayawan Muslim yang perlu diakomodir oleh NU. Apalagi di luar NU, ada organisasi atau lembaga yang serupa yang muncul dan mempunyai nuansa kepentingan politik. Untuk itu NU tidak mau kecolongan, sehingga demi kepentingan politik juga, NU membentuk wadah bagi seniman dan budayawan agar mereka tersalurkan bakat dan kreativitasnya.

Latar Kelahiran NU dan Pembelaan terhadap Tradisi Umat

Kelahiran Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi (*jamiyyah*) bagi umat Islam Indonesia pada 31 Januari 1926 merupakan proses panjang perjuangan para ulama (kiai) penganut ajaran Islam pola mazhab. Lahirnya organisasi NU tidak terlepas dari konteks sejarah bangsa dan umat Islam Indonesia di masa pra kemerdekaan. Munculnya organisasi umat Islam Indonesia seperti Al-Irsyad (1905), Muhammadiyah (1912), Persis (1918) dan juga gerakan-gerakan nasionalisme, seperti Boedi Oetomo (1908), Syarikat Islam (1912), yang sebelumnya bernama Syarikat Dagang Islam (SDI) yang lahir di Solo tahun 1911, telah mengilhami sejumlah tokoh pesantren untuk memiliki wadah organisasi. Proses lahirnya NU bermula dari beberapa pemuda pesantren yang sedang belajar di Makkah mendirikan cabang perhimpunan Syarikat Islam di sana, seperti Wahab Chasbullah asal Jombang Jawa Timur dan R. Asnawi asal Kudus Jawa Tengah (Wahid, 1989: 15-16).

Belum sempat mengembangkan perhimpunan (SI) di sana, mereka segera mudik kembali ke Indonesia karena pecah Perang Dunia I, di samping juga karena tuntutan keluarga dan keinginan untuk mengembangkan Islam di tanah air sendiri (Indonesia). Mereka adalah para santri yang *nota bene* berasal dari kultur agama yang sama (berpegang dengan haluan Ahlussunnah wal Jamaah). Hasrat mereka untuk mendirikan perhimpunan bersamaan dengan gelora semangat nasionalisme para pemuda Indonesia yang berjuang untuk mencapai kemerdekaan terbebas dari belenggu kolonial Belanda. Gelora tersebut mendorong kaum santri untuk turut serta dalam gerakan nasionalisme. Mereka mendirikan *Nahdlatul Wathan* (1924),

kemudian *Tashwirul Afkar* (1918) dan perhimpunan koperasi *Nahdlatul Tujjar* (1918). Selain itu, di Surabaya juga didirikan perhimpunan-perhimpunan lokal yang sejenis, yang antara lain adalah *Perikatan Wathaniyah*, *Tamirul Masjid* dan *At-Tadibiyah*. (Hasan, 2005: 314). Adapun di antara tokoh-tokoh utama dari perhimpunan tersebut adalah KH. M Hasyim Asyari dan KH. Wahab Hasbullah. Mereka juga terlibat aktif dalam jaringan aktivis gerakan Islam (SI) bersama-sama dengan tokoh dari organisasi lain seperti Muhammadiyah, al-Irsyad dan Persis (Haidar, 1994: 55).

Di dalam persyarikatan (SI) sering terjadi benturan-benturan kepentingan kelompok antara kaum modernis (dalam hal ini Muhammadiyah dan Persis) dengan kaum tradisional (kaum Sunni tradisional), terutama berkenaan dengan posisi dan aspirasi di dalam persyarikatan. Ketegangan terjadi sepanjang paruh pertama tahun duapuluhan dalam kongres *Al-Islam* dan berlanjut hingga dalam sidang-sidang Komite *Khilafat*, yaitu sebuah komite yang dibentuk oleh kongres SI untuk merespon masalah dihapusnya sistem khilafah dalam dunia (politik) Islam dengan berakhirnya kekuasaan Dinasti Turki Usmani. Komite ini dimaksudkan sebagai sikap resmi umat Islam Indonesia yang menjadi bagian dari geopolitik global umat Islam di dunia Islam.

Hubungan antara kelompok modernis dan tradisional kian memburuk di tahun 1924 ketika umat Islam Indonesia berusaha mencari kesatuan tanggapan terhadap dua isu internasional yang beredar di pers, yaitu masa depan kekhalifahan menyusul penghapusan institusi (kekhalifahan) oleh Parlemen Turki, dan direbutnya Makkah oleh pemimpin Wahabi, Abdul Aziz Ibnu Suud. Dua Kongres Islam Dunia dijadwalkan untuk membahas isu-isu tersebut, yang pertama di Kairo tahun 1925 dan kedua di Makkah setahun berikutnya. Sementara pada Kongres Islam Indonesia (Hindia Belanda) yang diadakan di Surabaya pada bulan Desember 1924, Wahab Chasbullah terpilih sebagai wakil kalangan tradisional dari tiga delegasi lainnya untuk mewakili Indonesia dalam Kongres Kairo, yakni H. Fachroeddin dari Muhammadiyah dan Surjopranoto yang mewakili Sarikat Islam. (Fealy, 1997:10). Namun pendelegasian itu urung, karena Kongres dunia Islam di Kairo sendiri diundur penyelenggaraannya.

Rancangan untuk kongres dunia kedua di Makkah menimbulkan perpecahan di antara wakil kaum tradisional dan kaum modernis. Kalangan Muslim tradisional khawatir Ibnu Suud akan melakukan restriksi terhadap pendidikan dan ritual Islam (tradisi) beraliran Syafii di Hijaz. Sebaliknya, kalangan Muslim modernis justru sangat senang dengan tampilnya Ibnu Suud di panggung kekuasaan, yang *nota bene* beraliran Wahabi penganut mazhab Hanbali yang dikenal puritan dan anti tradisi (*bidah*).

Pada Kongres Al-Islam di Yogyakarta tahun 1925, para delegasi kalangan tradisional berang oleh sikap kaum modernis yang menolak usulan Wahab Chasbullah agar Ibnu Suud menjamin kebebasan beragama untuk semua muslim di Makkah. Pada awal Januari 1926, sebuah konferensi para pemimpin modernis di Cianjur, Jawa Barat, yang sama sekali tidak mengundang kaum tradisional untuk ikut serta, dan mengusulkan delegasi lain untuk pergi ke Makkah, yaitu H.O.S. Colroaminoto mewakili Sarikat Islam dan Mas Mansur mewakili Muhammadiyah (Anam, 1985: 52).

Puncak ketegangan terjadi ketika delegasi yang dikirim ke Konggres Islam di Makkah tahun 1926 ternyata mengabaikan kepentingan-kepentingan kaum tradisional berkenaan dengan eksistensi ajaran mazhab dengan tradisi-tradisi Sunninya. Hal ini telah mendorong kelompok tradisional untuk membentuk perhimpunan lokal (kelompok tradisional) di Surabaya. Kelompok tradisional ini mendirikan organisasi baru yang berskala lebih besar dan nasional. Kaum tradisional menilai perhimpunan Islam oleh kaum modernis yang ada maupun di konggres *Al-Islam* sendiri tidak bersikap adil dan tidak akomodatif terhadap visi yang ingin mereka kembangkan.

Pada pertengahan Januari 1926, Wahab Chasbullah dengan restu Kiai Hasyim Asyari, mengundang para ulama tradisional terkemuka untuk mendukung pendirian panitia yang disebut Komite Hijaz. Komite ini akan mengutus delegasi ke Mekah untuk mewakili kepentingan-kepentingan kaum tradisional. Pada tanggal 31 Januari 1926, 15 ulama berkumpul di rumah Wahab Chasbullah di Surabaya dan mengesahkan bentuk kepanitiaan tersebut (Fealy, 1997: 10).

Karena merasa tidak terwakili dan juga tidak adanya komitmen kaum modernis untuk membawa aspirasi kaum tradisional, mereka mengirim delegasi sendiri ke Makkah untuk mempertahankan mazhab dan ajaran Sunni yang selama ini dipegangi dan akan dikembangkan. Untuk kepentingan itulah para tokoh kaum tradisional mendirikan *jamiyyah* (organisasi) NU, yang dimotori oleh KHM. Hasyim Asyari dan KH. Wahab Hasbullah. *Jamiyyah* NU secara resmi didirikan/dibentuk pada tanggal 16 Rajab 1344 H bertepatan dengan tanggal 31 Januari 1926 M di Surabaya.

Kuntowijoyo menyoroti bahwa NU (Nahdlatul Ulama) sesungguhnya lahir sebagai reaksi dari dua hal. *Pertama* adalah merupakan reaksi terhadap politisasi agama yang dilakukan SI (Syarikat Islam); dan *kedua* merupakan reaksi terhadap gerakan pembaharuan kaum modernis Muhammadiyah, yang menentang keras tradisi agraris dalam agama sebagai *symbolic formation*, seperti *haul*, *manâqib*, dan *barzanji*. Kesemua simbol ini dan semacamnya dinilai oleh kaum modernis Muhammadiyah sebagai *bidah* (Kuntowijoyo, 1991: 197).

Sikap kaum modernis yang justifikatif terhadap budaya-budaya keagamaan kaum agraris dan ancaman ajaran mazhab yang akan dikembangkan oleh kaum santri ini (yang dianggap sebagai faktor politis) hanyalah salah satu faktor yang mendorong berdirinya *jamiyyah* NU. Selain dari itu, ada faktor lain yang turut mendorong didirikannya *jamiyyah* NU oleh sekelompok ulama tradisional, yaitu semangat nasionalisme kaum santri dalam perjuangan untuk kemerdekaan, terutama karena alasan keagamaan (sebagai faktor dominan) untuk menegakkan kalimat Allah (*li ilâ-i kalimâtillâh*). Sebagai basis pengembangan Islam, para ulama telah merintis pengembangan Islam ke arah sosio-kultural melalui lembaga pendidikan pesantren yang dimiliki. Visi ini kemudian dikembangkan dengan rumusan yang lebih operasional yang disebut *jihâd fi sabilillâh*. Sebagaimana dijelaskan di atas, kelahiran NU sebagai *jamiyyah* telah didahului oleh berdirinya Nahdlatul Wathân (1924), *Tashwirul Afkâr* (1918) dan perhimpunan koperasi Nahdlatut Tujjâr (1918), *Perikatan Wathaniyah*, *Tamîrul Masâjid* dan *At-Tadîbiyah* di Surabaya.

Hal yang demikian pun sebenarnya juga diungkap Kuntowojoyo. NU sebenarnya bertujuan untuk melestarikan lembaga-lembaga dan tradisi-

tradisi Islam agraris dengan solidaritas mekanis komunalnya. Tampak sekali bahwa *concern* terbesar NU adalah pada upaya-upaya yang lebih utilitarian dalam pengertian peribadatan semata. Itulah yang menjadi alasan kenapa NU menolak kecenderungan SI dalam mobilisasi politik. Di samping itu, karena karakteristik NU adalah paternalisme kiai dan berorientasi kepada mazhab, ia menolak gerakan Muhammadiyah yang anti paternalisme dan non mazhab.

Dakwah Islam Kultural: Apresiasi NU terhadap Budaya Lokal

NU sebagai ormas Islam yang menjunjung tinggi budaya mengakomodir nilai-nilai tradisi masyarakat lokal. Khususnya upaya para ulama Jawa (kiai) untuk mempertahankan tradisi -kebudayaan Islam- lokal yang diresepsi menjadi bagian dari pengembangan pengamalan ajaran Islam di Indonesia khususnya dan di dunia Islam pada cakupan yang lebih luas. Dalam hal ini tradisi masyarakat lokal telah diabaikan oleh ormas atau kelompok Islam modernis yang lahir lebih dulu, yakni Muhammadiyah dan Persatuan Islam. Untuk kepentingan menjaga dan melestarikan tradisi lokal itulah para kiai mendeklarasikan NU sebagai ormas Islam pembela tradisi. Dalam konteks yang lebih spesifik, NU hadir untuk mempertahankan tradisi keberagaman dengan pola bermazhab, yakni mengikuti tradisi Islam *ala Ahlussunnah wal Jamaah* dengan menjadikan paham akidah (teologi) Asyariah dan Maturidiah sebagai panutan berakidah, mengikuti salah satu mazhab fikih dari empat mazhab yang populer (Hanafi, Maliki, Syafii, dan Hanbali), dan mengikuti jalan tasawuf *ala* Imam Al-Ghazali dan Junaid al-Baghdadi (Arifi, 2008: 83-84).

Corak tradisonalitas yang melekat pada NU membawa implikasi sosiologis bahwa NU memberi ruang yang luas untuk berkembangnya tradisi (budaya) lokal, seperti ziarah kubur (khususnya ke makam para wali (*ualiyâ*), *tahlilan* (doa bersama untuk orang mati), pembacaan shalawat al-Barjanzi, shalawatan (hadrah), kenduri, dan tradisi-tradisi lokal lainnya yang tumbuh dan berkembang di masyarakat Jawa, khususnya melalui pesantren sebagai basis kultural NU. Dalam istilah Gus Dur (Abdurrahman Wahid), tradisonalitas NU bisa dilihat dari "asal usul kultural" keterlibatan pesantren dalam pembangunan pedesaan adalah pertaliannya yang kuat dengan

berbagai bentuk tradisi lokal solidaritas sosial dengan masyarakat umum. (Abdurrahman Wahid, 2001:189-190).

Bahkan karena itulah kelompok Islam puritan (yang menolak tradisi) menuding NU sebagai kelompok yang menyuburkan penyelewengan akidah Islam dengan istilah “TBC” (takhayyul, bidah, dan khurafat). Tudingan itu sampai sekarang belum pupus dan dalam situasi tertentu pada basis massa di tingkat desa (*grass roots*) hal itu menjadi pemicu timbulnya perseteruan, baik terselubung atau terang-terangan antara warga NU dengan pengikut ormas lain, semisal Muhammadiyah.

Padahal ditilik dari sisi strategi dakwah Islam, keberpihakan dan penghargaan NU terhadap tradisi dan budaya lokal membawa keuntungan tersendiri bagi NU dalam upaya pengembangan Islam di Indonesia, karena dengan pendekatan kultural yang dilakukan oleh para ulama NU menjadikan NU lebih mudah diterima oleh masyarakat, terutama masyarakat awam yang memandang pentingnya tradisi-tradisi dan budaya lokal. Dan pada umumnya masyarakat seperti ini berada di wilayah-wilayah pinggiran dan pedesaan yang masih kuat pengaruh tradisi. Namun di sisi lain, keberpihakan NU yang demikian besar pada budaya lokal juga kadang kurang mendukung bagi pengembangan sumber daya manusia, karena perilaku tradisional masyarakat yang sulit untuk memodernisir diri akibat kuatnya berpegang kepada tradisi yang sangat berpengaruh dalam kehidupannya.

Kaum *nahdliyyin* (warga NU) dan mereka yang mengikuti mazhab Sunni sangat longgar dalam menerima bentuk-bentuk budaya masyarakat lokal, sehingga NU memiliki khazanah budaya yang sangat kaya. Sebut saja misalnya seni hadrah dan jamaah shalawatan yang bermunculan di berbagai daerah basis massa NU, group-group *nasyid*, dan sebagainya menunjukkan kreativitas budaya warga NU. Namun sayangnya, hal itu sebagai koleksi dari tradisi masyarakat NU yang bersumber dari budaya lokal tidak dikelola secara baik oleh NU sebagai jam iyyah dan kalau toh dikelola itu pun belum optimal. Apalagi lembaga yang mengurus kebudayaan dalam organisasi NU, yaitu Lesbumi (Lembaga seniman, budayawan Muslimin Indonesia) yang pada tahun 60-an cukup berpengaruh, selama ini tidak menampakkan eksistensinya, bahkan bisa dikatakan “*mati suri*”. Oleh sebab itu khazanah kebudayaan masyarakat NU tercerabut dari induknya, sehingga

yang terjadi adalah berjalan sendiri-sendiri, tanpa adanya garis komando atau koordinasi organisatorisnya. Di sinilah kiranya perlunya upaya merevitalisasi kebudayaan NU untuk menunjukkan eksistensi kebudayaan NU, baik dari aspek konseptual maupun aktualisasinya.

Konsep Kebudayaan NU: Sensitivitas Islam terhadap Budaya

Dewasa ini kebudayaan diartikan sebagai manifestasi kehidupan setiap orang dan setiap kelompok orang-orang. Kebudayaan meliputi segala perbuatan manusia, seperti cara ia menghayati kematian dan membuat upacara-upacara untuk menyambut peristiwa itu; demikian juga mengenai kelahiran, seksualitas, cara-cara mengolah makanan, sopan santun waktu makan, pertanian, perburuan, cara ia membuat alat-alat, belah pecah, pakaian, cara-cara untuk menghias rumah dan badannya. Itu semua termasuk kebudayaan, seperti juga kesenian, ilmu pengetahuan, dan agama. (Peurson, 1976:10). Pengertian kebudayaan dalam arti yang demikian berarti memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang dinamis, bukan sesuatu yang statis dan kaku.

Pengertian ini mengoreksi pengertian kebudayaan yang dipahami oleh umumnya masyarakat akademis sebagai segala manifestasi dari kehidupan manusia yang berbudi luhur dan bersifat rohani, seperti agama, kesenian, filsafat, ilmu pengetahuan, tata negara, dan sebagainya. Ciri khas bagi pendapat seperti ini ialah perbedaan yang dibuat antara “bangsa-bangsa berbudaya” (yang beradab tinggi) dan “bangsa-bangsa alam” (yang dianggap lebih primitif). Tetapi pendapat ini sudah sejak lama disingkirkan.

Dalam pengertian yang dinamis di atas (yang pertama), termasuk juga dalam pengertian kebudayaan di sini adalah tradisi, dan “tradisi” dapat diterjemahkan dengan pewarisan atau penerusan norma-norma, adat-istiadat, kaidah-kaidah, harta-harta. Tetapi tradisi tersebut bukanlah sesuatu yang tak dapat diubah; tradisi justru diperpadukan dengan aneka ragam perbuatan manusia dan diangkat dalam keseluruhannya. Manusia adalah yang membuat sesuatu dengan tradisi itu: ia manerimanya, menolaknya atau mengubahnya dan menciptakannya. Itulah sebabnya mengapa kebudayaan merupakan cerita tentang perubahan-perubahan: riwayat manusia yang

selalu memberi wujud baru kepada pola-pola kebudayaan yang sudah ada di tengah masyarakatnya (Peurson, 1976:11).

Jika ditelusuri lebih jauh, dalam konteks perkembangan peradaban manusia, lahirnya Islam sebagai agama merupakan proses kesinambungan peradaban masyarakat beragama. Islam sendiri sebagai agama muncul di tengah-tengah masyarakat Arab yang sangat kuat memegang tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang mereka dari generasi ke generasi. Dengan demikian dapat dikatakan, Islam lahir bukan pada masyarakat yang hampa budaya, akan tetapi ia lahir pada masyarakat yang sarat budaya. Dengan pemahaman yang demikian, maka Islam sebagai agama merupakan proses dialog yang intensif antara agama dan budaya, meski dalam realitas praksisnya kadang menimbulkan *tention* (ketegangan) dan konflik.

Sebagai misal, al-Quran sebagai wahyu Allah dilihat dari sudut pandang ilmu kesasteraan, maka al-Quran mengandung nilai-nilai kesasteraan yang sangat tinggi dengan memiliki gaya bahasa (*balaghah*) yang melebihi gaya bahasa masyarakat Arab pada saat itu yang memang memiliki prestasi kesasteraan yang tinggi dan sangat mengapresiasi karya sastra. Demikian juga ketentuan-ketentuan syariat (hukum) yang terkandung dalam al-Quran muncul oleh karena sebab-sebab tertentu (*asbab al-nuzul*) atau dalam konteks Sunnah Nabi s.a.w. ada faktor yang mengiringi keluarnya suatu hadis (*asbab al-wurud*) dan sekaligus menjawab persoalan yang sedang timbul di tengah masyarakat. Termasuk di dalamnya, aspek-aspek peribadatan (seperti shalat, puasa, zakat dan haji) merupakan bentuk pelestarian dari tradisi dan budaya dari nenek moyang bangsa Arab yang sudah berlangsung lama jauh sebelum hadirnya agama Islam yang dibawa Rasulullah Muhammad s.a.w. Demikian juga aspek-aspek muamalah (seperti perkawinan, jual-beli, dan aspek muamalah lainnya) merupakan pengakuan atas tradisi masyarakat Arab masa lalu dan Arab Jahiliyah, dengan memberikan nuansa atau warna yang baru, yakni Islam yang bersendikan tauhid. Dengan konteks yang demikian, maka proses dialog agama dan budaya akan selalu terjadi di sepanjang zaman dan di segala tempat.

Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa kehadiran Islam sebagai agama merupakan agama yang sensitif (responsif) terhadap budaya masyarakat Arab pada saat itu. Muhammad s.a.w. sendiri diutus sebagai Rasulullah dengan

misi utamanya adalah membangun masyarakat berbudaya dan beradab (*buitstu liutammima makârim al-akhlâq*). Sehingga para pengikut jejak Rasulullah dalam mengembangkan Islam (dakwah islamiyah), mulai dari generasi sahabat, tabiin dan seterusnya tidak meninggalkan pendekatan kultural. Bahkan pada masa keemasan Islam (abad 2 H/10 M) Islam memiliki prestasi kebudayaan yang sangat tinggi. Hal itu bisa dilihat dari berbagai peninggalan keemasan Islam, misalnya arsitektur bangunan-bangunan masjid, kerajaan Islam, kaligrafi, seni musik, karya sastra dan sebagainya. Bahkan hingga abad modern ini, di berbagai wilayah basis pengembangan Islam, seperti Arab Saudi, Mesir, Irak, India, termasuk Indonesia masih dapat disaksikan prestasi kebudayaan Islam yang sangat tinggi.

Karakteristik Kebudayaan NU

NU dengan ciri Islam budayanya menjadikan NU memiliki ruang gerak yang luas untuk mengaktualisasikan nilai-nilai dan produk kebudayaannya yang berbasis kebudayaan lokal. Jika dicermati secara mendalam, nilai kebudayaan yang dikembangkan oleh NU mengacu pada spiritualitas kebudayaan yang bercirikan tiga hal: keislaman, keindonesiaan, dan kemaslahatan. Keislaman dalam pengertian apapun produk oleh pikir dan kreativitas krida manusia bisa diterima sebagai kebudayaan Islam, manakala ia didasari atau diilhami oleh nilai-nilai Islam, meski ia bukan produk asli dari Islam selama ia tidak melanggar atau melampaui batas nilai-nilai dasar (substansi) dari ajaran Islam. Nilai dasar Islam dimaksud adalah nilai-nilai yang tercermin dalam konsep *qawaid ushuliyah* (kaidah-kaidah prinsip dalam Islam), seperti ketauhidan, keadilan, kesetaraan, kemudahan, kemaslahatan.

Ciri keindonesiaan sebagai spirit kebudayaan NU dalam makna bahwa semua kebudayaan yang berasal dari hasil kreasi olah pikir dan krida bangsa Indonesia adalah kebudayaan yang bisa diterima sebagai kebudayaan bangsa dan itu perlu diakui dan dihargai selama itu benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan budaya bangsa yang beradab dan berketuhanan.

Kemaslahatan sebagai ciri kebudayaan NU adalah bahwa apapun nama dan wujudnya, setiap hasil kebudayaan, baik pemikiran, karya seni, dan sebagainya, ketika itu mengandung kebaikan dan manfaat bagi

masyarakatnya, maka itu bisa dinilai sebagai kebudayaan bangsa dan tidak perlu ditolak atau dinafikan keberadaannya. Oleh sebab itu segala bentuk ekspresi kebudayaan yang dihasilkan oleh bangsa Indonesia, baik itu berupa seni, teknologi, arsitektur, mode pakaian dan lainnya di daerah mana pun dapat diterima oleh NU, selama itu nyata-nyata memberi kemanfaatan bagi masyarakatnya.

Ketiga ciri kebudayaan dan spiritualitas kebudayaan yang dikembangkan oleh NU (keislaman, leindonesiaan, dan kemaslahatan) tersebut tidak lepas dari -dan didasari oleh- nilai-nilai dasar NU yang terumuskan dalam *fikrah nahdliyah* sebagai karakteristik pemikiran NU, yang meliputi aspek Moderasi (*Tawasuth*), Harmoni dan Keseimbangan (*Tawazun*) dan Toleransi (*Tasamuh*). (Arifi, 2008: 83-85).

Tiga aspek pokok dalam *fikrah mahdliyah* ini merupakan penyangga utama bagi keberadaan NU sebagai *jam iyyah diniyyah* dan watak (karakter) budaya warga NU dalam beragama dan bermasyarakat. Sikap moderasi NU tersebut ditampakkan pada pilihan mengikuti pola mazhab dalam beragama, dengan menghargai dan mengakui keberadaan mazhab yang lain. Mazhab Ahlussunnah wal Jamaah (Aswaja) yang menjadi pilihan NU adalah mazhab yang sangat moderat. Ia berada di antara ekstrimitas kaum rasionalis Qadariyah-Mu'tazilah dan ekstrimitas kaum fatalis Jabariyah. Ia berada di tengah antara ekstrimitas politik Syiah yang mengagungkan Ahlul Bait dan ekstrimitas Khawarij yang fundamentalistik.

Sikap harmoni atau keseimbangan NU tercermin dalam perilaku yang memperhatikan kehidupan keduniaan dan keakhiratan. Apa pun yang dilakukan warga NU dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat, maka ia harus selalu memperhatikan dua kepentingan, yakni kepentingan duniawiah (aspek materialistik) dan kepentingan jangka panjang ukhrawiah (aspek spiritualistik). Dua kepentingan ini tidak bisa dikesampingkan salah satunya dengan memenangkan salah satu yang lainnya.

Sedangkan sikap toleransi NU tercermin pada sikap menghargai tradisi dan budaya lokal tanpa menghilangkan substansi kilai-nilai Islam yang fundamental. Demikian juga dalam kehidupan beragama, NU sangat menghargai adanya perbedaan yang memang merupakan sunnatullah, baik

itu perbedaan warna kulit, ras, suku, bahkan pilihan beragama. Oleh karena itu, NU sangat dikenal sebagai kelompok Islam yang memiliki toleransi yang tinggi terhadap berbagai bentuk praktik keberagamaan (peribadatan) sampai pada praktik-praktik tardisi-tradisi masyarakat, seperti sesajian yang dilakukan dalam acara-acara ritual masyarakat Jawa, seperti syuronan, labuhan, prosesi perawatan dan penghormatan terhadap orang sudah meninggal, dan sebagainya.

Singkat kata, NU sangat menjunjung tinggi sikap toleransi terhadap berbagai ekspresi perbedaan kultural hingga ideologi yang terjadi di tengah masyarakat majemuk di Indonesia maupun di dunia. Sekalipun tidak jarang sikap toleransi NU ini justru mendapat serangan dan cercaan dari kelompok Islam yang lain yang tidak sependapat dan berseberangan faham keagamamaannya dengan NU.

Local Wisdom: Strategi Pengembangan Kebudayaan Berbasis Kultural dan Iptek

Orientasi (titik berat dan fokus perhatian) pengembangan Islam yang dilakukan NU adalah pengembangan masyarakat Islam berbasis kultural, sehingga NU memberikan apresiasi yang tinggi kepada keberlangsungan budaya lokal dan memberikan sentuhan nilai-nilai Islam terhadap kebudayaan dan tardisi yang dipandang belum islami. Di sini warga NU bisa mengintegrasikan dalam kebudayaan masyarakat setempat. Oleh sebab itu kearifan lokal (*local wisdom*) sangat dikedepankan oleh ulama NU dalam mengembangkan (nilai-nilai) Islam. Dalam hal ini, *dakwah bi al-hikmah wa al-mauidhat al-hasanah* menjadi strategi yang ampuh dalam usaha pengembangan kebudayaan Islam di tanah air tanpa harus mengorbankan esensi Islam atau menghilangkan budaya lokal.

Patut disimak sebuah kaidah (*qaul al-hikmah*) dari ulama: “*al-Hikmat dlâllat al-mukmin fa Annâ Wajadahâ Fahuwa Haqqun Bihâ*” (Hikmah atau *local wisdom* adalah sesuatu yang dicari oleh orang mukmin di mana pun ia berada, maka siapa yang mendapatinya, dialah yang berhak atasnya). Kaidah ini merupakan landasan operasional bagi strategi pengembangan kebudayaan ala NU. Dengan memahami kearifan lokal, maka pengembangan kebudayaan (Islam) akan lebih mudah diterima oleh

masyarakat. Kearifan lokal dimaksud adalah sikap bijak untuk menggali dan menghargai tradisi-tradisi yang berkembang dan masih berlangsung di masyarakat. Dalam hal ini, ulama NU lebih melihat kepada sisi positifnya dari tradisi lokal dan tetap mempertahankannya selama itu tidak menyimpang dari prinsip-prinsip Islam yang fundamental. daripada serta merta menolak dan melarangnya. Pada dataran *local wisdom* inilah prinsip-prinsip dan spirit pengembangan kebudayaan model NU dapat diimplementasikan, yakni keislaman, keindonesiaan, dan kemaslahatan.

Pada sisi yang lain, pengembangan kebudayaan tidak bisa terlepas dari perkembangan ilmu dan teknologi (Iptek). Oleh karena kebudayaan dan iptek merupakan dua serangkai yang tidak bisa dipisahkan. Sebagaimana dalam rumusan William W. Lawrence, ilmu dan teknologi mempengaruhi nilai-nilai budaya, sebaliknya budaya mempengaruhi kinerja teknologi. Ilmu dan teknologi tidak bisa tumbuh subur tanpa ditopang oleh budaya yang kondusif, sebaliknya kebudayaan dan masyarakat tak dapat berfungsi dengan wajar tanpa didukung oleh perkembangan yang sehat dari ilmu dan teknologi. Dengan demikian antara kebudayaan, ilmu dan teknologi adalah tiga serangkai yang saling membutuhkan dan saling mengisi. Dalam konteks yang demikian, pengembangan suatu kebudayaan tidak bisa menghindar dari pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi, sehingga transformasi kebudayaan suatu masyarakat akan terjadi manakala ilmu dan teknologi turut mewarnai kebudayaan.

Ada dua hal penting yang dapat digarisbawahi dari pernyataan di atas. *Pertama*, menyadari semakin pentingnya peranan Iptek dalam kerangka pengembangan kebudayaan Islam, maka pemanfaatan pengembangan dan penguasaan iptek merupakan sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. *Kedua*, kesadaran bahwa betapapun pentingnya hal itu, dalam proses pengembangan kebudayaan Islam sama sekali tidak boleh tercerabut dari akar-akar budaya lokal.

Tetapi ada hal yang harus dijernihkan di sini. Membelah kategori konseptual antara iptek dan kebudayaan, sebenarnya agak sulit dilakukan. Sebab jika kebudayaan itu kita pahami sebagai sistem nilai, sistem simbol dan sistem reproduksi ideasional, serta seluruh aktivitas dan kristalisasi segala upaya manusia untuk menjawab tantangan hidupnya, dan kesemuanya itu

kemudian diolah dan ditafsirkan kembali untuk memperoleh maknanya melalui suatu proses dialektis yang tidak pernah mengenal titik henti, maka tak pelak lagi iptek merupakan bagian inti dari seluruh proses tersebut. Dapat dikatakan bahwa maju-mundurnya perkembangan iptek pada suatu masyarakat, akan sangat erat kaitannya dengan kondisi-kondisi budaya yang mengelilingi.

Simpulan

NU menyadari sepenuhnya bahwa pengembangan kebudayaan Islam tidak serta merta mengakomodir semua dari setiap budaya lokal yang ada, akan tetapi yang lebih penting adalah apakah hasil kebudayaan itu benar-benar memiliki nilai manfaat (maslahat) bagi masyarakat dan ia tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran dasar Islam. Inilah makna kebudayaan yang harus selalu diperhatikan untuk pengembangan kebudayaan Islam ke depan. Apalagi tantangan budaya pop yang semakin meraja lela dan semakin tipisnya alat filter kebudayaan di negeri ini, sehingga aspek kemaslahatan agama dan kearifan lokal semakin terabaikan. Inilah barangkali yang perlu menjadi renungan bagi kita umat Islam, khususnya kaum nahdliyyin yang sangat peduli dengan budaya yang islami.

Sebenarnya jika disadari, Les bumi sebagai wadah tempat bernaungnya para seniman dan budayawan Muslim memiliki nilai strategis bagi perkembangan NU ke depan. Mengingat semakin besar dan berpengaruhnya kebudayaan terhadap tatanan sosial masyarakat dan juga keberagaman umat, maka selayaknya lembaga Seni Lesbuni perlu diberdayakan kembali dan seharusnya diperhatikan secara serius akan nasib lesbumi sebagai salah satu pilar organisasi NU. Dengan menghidupkan kembali dan benar-benar dikelola secara serius berarti pula menunjukkan eksistensi NU sebagai organisasi yang memang berpihak kepada kebudayaan dan nyata-nyata NU sebagai kelompok Islam Kultural dalam arti yang sebenarnya.

Daftar Pustaka

Wahid, Abdurrahman. 1989. *Kiai Bisri Syansuri: Pecinta Fiqih Sepanjang Hayat*. Jakarta: Amanah.

- Wahid, Abdurrahman. 2001. *Menggerakkan Tradisi Essai-essai Pesantren*. Yogyakarta: LKiS.
- Arifi, Ahmad. 2008a. *Jejak Fiqih Sunni di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media.
- Arifi, Ahmad. 2008b. *Pergulatan Pemikiran Fiqih "Tradisi" Pola Madzhab*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Peurson, C.A. van. 1976. *Strategi Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Anam, Choirul. 1985. *Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama*. Sala: Jatayu.
- Fealy, Greg dan Greg Barton (Eds.). 1997. *Tradisionalisme Radikal Persinggungan Nahdlatul Ulama-Negara Tradisionalisme Radikal Persinggungan Nahdlatul Ulama-Negara*. Terjemahan oleh Ahmad Suaedy dkk., Yogyakarta: LKiS.
- Wijoyo, Kunto. 1991. *Paradigma Islam Interpretasi Untuk Aksi*. Bandung: Mizan.
- Haidar, M.Ali. 1994. NU: Wawasan Sosio-Kultural dan Keagamaan. *Majalah AULA*, No. 03/Tahun XVI/Maret.
- Hasan, Muhammad Tholhah. 2005. *Ahlussunnah wal Jamaah dalam Persepsi dan Tradisi NU*. Jakarta: Lantabora Press.
- PBNU. 2004. *Hasil-hasil Muktamar XXXI 28 Nopember- 2 Desember 2004 di Asrama Haji Donohudan Boyolali Jawa Tengah*. Jakarta: Sekretariat PBNU.
- Siradj, Said Agiel. 1997. *Ahlussunnah wal Jamaah dalam Lintasan sejarah*. Yogyakarta: LKPSM NU.